

IMPLEMENTASI GADAI EMAS DI BRISYARIAH

DALAM PRESPEKTIF PBI NO. 10/17/2008

OLEH :

MAWADDAH SILMI

NIM: 25.13.1.020



D III PERBANKAN SYARIAH

FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA

MEDAN

2016 M / 1437 H

**IMPLEMENTASI GADAI EMAS DI BRISYARIAH
DALAM PRESPEKTIF PBI NO. 10/17/2008**

SKRIPSI MINOR

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk
Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md) pada Program Diploma III
Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam

OLEH:

MAWADDAH SILMI

NIM: 25.13.1.020



**D III PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUMATERA UTARA
MEDAN
2016 M / 1437 H**

LEMBAR PERSETUJUAN

IMPLEMENTASI GADAI EMAS DI BRISYARIAH

DALAM PRESPEKTIF PBI NO 10/17/2008

SKRIPSI MINOR

OLEH :

MAWADDAH SILMI

NIM. 25131020

Dapat Disetujui Sebagai Salah Satu Persyaratan

Untuk Memperoleh Gelar Ahli Madya (A.Md)

Pada Program D III Perbankan Syariah

Medan, Maret 2015

Menyetujui

Pembimbing

Mengetahui,

Ketua Program Diploma III
Perbankan Syariah

Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP. 1979 0701 200912 2 003

Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP. 1976 0818 200710 1 010

PENGESAHAN

Skripsi minor ini berjudul “**IMPLEMENTASI GADAI EMAS DI BRISYARIAH**

DALAM PRESPEKTIF PBI NO 10/17/2008 ”.Mawaddah Silmi, NIM

25.13.1.020 Program Studi D III Perbankan Syariah telah dimunaqasyahkan dalam Sidang Munaqasyah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN-SU Medan, pada tanggal 30 Maret 2016.

Skripsi ini telah diterima untuk memenuhi syarat memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada program studi D III Perbankan Syariah UIN Sumatera Utara.

Medan, Maret 2016
Panitia Sidang Munaqasah Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

Ketua,

Sekretaris,

Dr. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP. 1979 0701 200912 2 003

Zuhrinal M. Nawawi, MA
NIP. 1976 0818 200710 1 010

Anggota

Penguji I

Penguji II

Dr. Yenni Samri Juliati Nst, MA
NIP. 1976 0818 200710 1 010

Mengetahui,
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Sumatera Utara

IKHTISAR

Rahn dengan gadai emas di PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) KCP Binjai merupakan produk pinjaman dengan jaminan barang berupa emas yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal dana untuk waktu yang singkat dengan proses yang cepat, mudah dan penggunaannya tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Pada produk ini emas merupakan barang yang ditahan sebagai jaminan pinjaman yang akan diberikan, nasabah hanya dikenakan biaya sewa kepada bank atas fasilitas tempat penyimpanan emas yang dijamin. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum pelaku gadai di BRISyariah KCP Binjai dan bagaimana implementasi gadai di BRISyariah KCP Binjai. Metode penelitian yang digunakan adalah metode pendekatan deskriptif, kualitatif, yaitu mengumpulkan data yang diperoleh kemudian menginterpretasikannya dan menganalisisnya sehingga dapat menjawab pertanyaan yang menyangkut sesuatu pada sedang berlangsungnya proses riset. Data yang digunakan adalah data primer dan sekunder. Dengan demikian berdasarkan hasil penelitian ini diharapkan pada masa yang akan datang di PT. BRISyariah KCP Binjai dapat mempertahankan prosedur tersebut agar menjadi lebih baik serta memaksimalkan strategi promosi untuk meningkatkan jumlah nasabah pada produk *Rahn* dengan gadai emas.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Alhamdulillah, segala puji dan syukur bagi Allah 'Azza Wa Jalla yang telah memberikan penulis kesehatan, kekuatan dan semangat ditengah kendala dan keterbatasan ilmu yang dimiliki hingga akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi minor yang berjudul **“IMPLEMENTASI GADAI EMAS DI BRISYARIAH**

DALAM PRESPEKTIF PBI NO 10/17/2008” yang mana sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Ahli Madya (A.Md) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara. Sholawat dan salam yang tak pernah bosan dan jemunya kita berikan kepada Nabi besar kita putra Abdullah buah hati aminah yaitu baginda besar Nabi Muhammad Rasulullah SAW yang mana dia telah membawa kita dari alam yang gelap gulita hingga kealam yang terang benderang sampai saat ini, semoga kelak kita akan mendapat syafaatnya kelak, Aamiin.

Skripsi ini disusun guna memenuhi persyaratan akademis untuk memperoleh gelar ahli madya (A.Md) Konsentrasi Perbankan Syariah di UIN Sumatra Utara.

Skripsi ini penulis persembahkan kepada orang-orang teristimewa yang sangat berarti di hati penulis dengan mengucapkan terimah kasih kepada :

1. Ayahanda tercinta Jemingan S.Pd dan ibunda tersayang Nuraini yang telah memberikan kasih sayang dan kepercayaan yang tulus diberikan serta dukungan baik moril maupun materil yang selama ini penulis nikmati, do'a

restu serta dorongan semangat sehingga timbul kepercayaan diri untuk menyelesaikan studi ini hingga ke jenjang Ahli Madya.

2. Adinda Mujadid Ilman dan Ismail Hamdi yang telah memberikan semangat, perhatian, dan do'a serta bantuannya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan.

Penulis dapat menyelesaikan skripsi minor ini berkat arahan dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati penulis haturkan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi minor ini yaitu kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Nur Ahmad Fadhil Lubis. MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
2. Bapak Dr. H. Azhari Akmal Tarigan, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
3. Bapak Zuhri M. Nawawi, MA selaku Ketua Jurusan D III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
4. Ibu Dr. Hj. Yenni Samri Juliati Nst. MA selaku Sekertaris Jurusan D III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri Sumatera Utara.
5. Ibu Dr.Hj. Yenni Samri Juliati Nst. MA selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah memberikan masukan dan arahan dalam penyelesaian skripsi minor ini.
6. Bapak Khairul Fahmi selaku Direktur Utama PT. BRISYARIAH KCP Binjai yang memberikan kesempatan kepada penulis untuk memperoleh data-data penelitian pada penulisan skripsi minor ini.

7. Seluruh staf pengajar dan pegawai dilingkungan Jurusan D III Perbankan Syariah Universitas Islam Negeri atas didikan dan bantuan selama masa perkuliahan.
8. Sahabat terbaikku Diva Pratami Putri yang selalu memberikan semangat, motivasi serta bantuan kepada penulis.
9. Sahabatku d'fimwics : Desy Alfiah, Fina Indriani Marpaung, Meiyana Dzulaika Pasaribu, Winda Lestari Ilwa, Chaliza Zuhasni atas bantuan dan motivasinya.
10. Teman-teman seperjuangan dari Perbankan Syariah yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, yang selalu membantu penulis dalam memberikan motivasi serta masukan yang berarti.

Penulis memohon semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang terbaik atas bantuan yang telah diberikan kepada penulis. Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, maka untuk itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat membangun dari semua pihak sehingga dapat membantu skripsi ini menjadi lebih baik.

Akhir kata, kepada Allah penulis memohon ampun dengan harapan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak dan bagi peneliti selanjutnya. Terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu penulisan skripsi ini.

Medan, Maret 2016
Penulis

Mawaddah Silmi

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN	i
PENGESAHAN	ii
IKHTISAR	iii
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian	4
D. Manfaat Penelitian	4
E. Metode Penelitian	5
F. Sistematika Penulisan	5
BAB II LANDASAN TEORITIS	7
A. Gadai (<i>Rahn</i>)	7
1. Pengertian Gadai (<i>Rahn</i>)	7
2. Dasar Hukum Gadai (<i>Rahn</i>)	8
3. Rukun dan Syarat Gadai (<i>Rahn</i>)	11
4. Manfaat dan Risiko Gadai (<i>Rahn</i>)	13
5. Berakhirnya Ikatan Akad Gadai (<i>Rahn</i>)	15
6. Aplikasi Gadai (<i>Rahn</i>) Dalam Perbankan Syariah.....	17
B. Hal-hal yang berkaitan dengan Gadai (<i>Rahn</i>)	17

BAB III : GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN	22
A. Sejarah PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRISyariah)	22
B. Visi dan Misi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah	23
C. Struktur Organisasi PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP	
Binjai	24
D. Produk-produk PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah KCP	
Binjai	28
BAB IV: PEMBAHASAN DATA HASIL PENELITIAN	
A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pelaku Gadai Emas	
Di BRISyariah KCP Binjai	31
B. Implementasi Gadai Emas di BRISyariah KCP Binjai	36
BAB V : PENUTUP	39
A. Kesimpulan	39
B. Saran	40
DAFTAR PUSTAKA	41
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	43

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Gadai syariah sering diindentikkan dengan *rahn* yang secara bahasa diartikan *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal) sebagian ulama member *arti al-hab* (tertahan). Sedangkan definisi *al-rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarak untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.¹

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan jasa dan/ atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.²

Salah satu kegiatan usaha syariah yang cukup berkembang pesat di masyarakat adalah layanan gadai emas syariah. Gadai emas syariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas sebagai salah satu alternatif memperoleh pembiayaan secara cepat. Jaminan emas yang diberikan disimpan dalam

¹ Muhammad sholahuddin, *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*, (Yogyakarta : Ombak 2014), hal. 197

² Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana 2009), h 389

penguasaan atau pemeliharaan bank dan atas penyimpanan tersebut nasabah diwajibkan membayar biaya sewa.³

Produk gadai emas ini bertujuan untuk dapat membantu masyarakat menengah kebawah dalam upaya mendorong pertumbuhan perekonomian yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat untuk keperluan dana mendadak dan mendesak.⁴

Praktek gadai emas pada dasarnya dinilai tidak melanggar hukum atau peraturan nasional. Bank Indonesia telah mengatur peraturan mengenai produk-produk yang ditawarkan oleh Bank Syariah kepada nasabahnya, yaitu melalui Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang Produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.⁵

Bank Rakyat Indonesia (BRISyariah) adalah salah satu lembaga keuangan yang melihat peluang besar di indonesia sejak beberapa tahun lalu. Gadai emas di Brisyariah hampir sama dengan konvensional. Perbedaannya adalah hanya pada bunga yang dibebankan pada pinjaman. Di Bank syariah hanya menggunakan biaya administrasi seperti biaya penjagaan barang, pemeliharaan dan biaya penaksiran yang ditetapkan diawal pembiayaan.

Pada prinsipnya ketika melakukan transaksi gadai, nasabah menyerahkan barang yang nasabah miliki untuk mendapatkan pinjaman dana. Atas pinjaman dana tersebut, nasabah dibebankan beberapa macam biaya hingga waktu nasabah dapat

³ Ibid h 402

⁴ Abdul Ghofur Ansori, *Penerapan Prinsip Syariah*, (Jakarta : Kencana 2009) ,hal. 58

⁵ Zubairi Hasan *Undang-undang Perbankan Syariah*, (Jakarta : Rajawali Pers 2009), hal. 88

melunasi pinjaman tersebut. Dalam surah Al-Baqarah ayat 283 Allah Swt berfirman

.⁶

وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ
بَعْضُكُمْ بِبَعْضٍ فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِيَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا
تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ آثِمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا
تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ﴿٢٨٣﴾

Artinya : Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutan). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertawakal kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. (Q.S Al-Baqarah : 283)

Semakin besarnya minat masyarakat akan pembiayaan gadai syariah, maka perbankan syariah yang merupakan salah satu lembaga yang menyediakan produk tersebut harus tetap dikawal agar tidak ada terjadi penyimpangan terhadap sistem yang telah ada karena dapat merusak citra perbankan syariah pada masyarakat. Oleh karena itu, diperlukan pengawasan terhadap penerapan dan pelaksanaan produk pembiayaan ini agar masyarakat yang telah menggunakan produk tersebut semakin yakin dengan prinsip syariah yang telah dijelaskan dan untuk masyarakat yang belum memanfaatkan produk pembiayaan menjadi yakin dan tertarik dengan produk tersebut.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perlindungan hukum pelaku gadai di BRISyariah KCP Binjai?
2. Bagaimana implementasi gadai emas di BRISyariah KCP Binjai?

⁶ M.Nur Rianto Al arif, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Bandung : Pustaka Setia, 2012) hal.

C. Tujuan Penelitian

Sejalan dengan rumusan masalah diatas, maka penelitian ini bertujuan :

1. Untuk mengetahui bagaimana perlindungan hukum terhadap nasabah pelaku gadai emas syariah di BRISyariah KCP Binjai.
2. Untuk mengetahui bagaimana implementasi gadai emas secara syariah di BRISyariah KCP Binjai Manfaat Penelitian.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari hasil penelitian dapat dilihat secara teoritis dan praktis yaitu :

1. Secara teoritis, Penelitian ini diharapkan dapat menambah dan memperkaya wawasan islam baik secara umum maupun khusus menumbuhkan sikap kritis terhadap implementasi gadai emas syariah pada perbankan syariah memperkaya ruang lingkup gadai emas syariah. Diharapkan dapat menambah bahan kepustakaan tentang gadai emas syariah yang ada di Indonesia khususnya pada perbankan syariah.
2. Secara Praktis, dengan mengetahui gadai emas syariah kepada masyarakat Indonesia yang mayoritas muslim dapat menjalankan usaha gadai emas yang secara syariah.
3. Dan diharapkan juga dapat berguna dalam penyusunan Undang-undang mengenai gadai emas di BRISyariah KCP Binjai.

E. Metode Penelitian

1. Lokasi Penelitian

Untuk mendapatkan data sebagai bahan dalam penulisan proposal ini, penulis melakukan penelitian pada perbankan syariah.

2. Teknik Pengumpulan Data

Library Pustaka (study pustaka), yaitu dengan cara mengumpulkan data melalui perpustakaan untuk mengetahui kejelasan mengenai bahan yang diteliti, baik yang bersumber dari buku maupun majalah yang mendukung judul tulisan ini.

Dan Interview yaitu Tanya jawab langsung kepada pegawai Bank Rakyat Indonesia Syariah dalam mendapatkan keterangan yang penulis butuhkan.

3. Teknik Pengelolaan dan Analisis Data

Setelah data dikumpulkan, maka data tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan metode analisi deskriptif yaitu menguraikan dan menggambarkan data sesuai dengan kategori dan masalah penelitian.

F. Sistematika Penulisan

Secara garis besar proposal ini membahas beberapa bab yang masing-masing sub-sub disesuaikan dengan kepentingannya untuk memudahkan penulis membatasi ruang lingkup akan membahas dan akan lebih mudah dipahami.

BAB I Pendahuluan, Pada bab ini diuraikan tentang latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II Landasan Teori, Dalam bab ini diuraikan pengertian Gadai Emas Syariah, akad perjanjian transaksi gadai, aplikasi gadai dalam lembaga keuangan perbankan.

BAB III Hasil Penelitian Lapangan, Dalam Bab ini diuraikan gambaran umum perusahaan yaitu mengenai sejarah singkat berdirinya Bank Rakyat Indonesia Syariah, Arti logo Bank Rakyat Indonesia Syariah, Visi dan misi Bank Rakyat Indonesia Syariah, struktur organisasi, job description Bank Rakyat Indonesia Syariah, dan produk yang ditawarkan.

BAB IV Hasil pembahasan, Dalam bab ini diuraikan petunjuk dan ketentuan umum dalam pelaksanaan pinjaman gadai emas syariah, syarat-syarat pelaksanaan pinjaman gadai emas syariah, alur proses pelaksanaan gadai emas syariah, peranan pelaksanaan pinjaman gadai emas syariah pada Bank Rakyat Indonesia Syariah.

BAB V Penutup, Pada bab ini penulis menarik kesimpulan berdasarkan analisa, penelitian dan evaluasi masalah yang timbul. Kemudian penulis mencoba member saran dan kesimpulan dari hasil penelitian tersebut.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. GADAI (*RAHN*)

1. Pengertian Gadai (*Rahn*)

Gadai syariah sering diindentikkan dengan *rahn* yang secara bahasa diartikan *al-tsubut wa al-dawam* (tetap dan kekal) sebagian ulama member arti *al-hab* (tertahan). Sedangkan definisi *al-rahn* menurut istilah yaitu menjadikan suatu benda yang mempunyai nilai harta dalam pandangan syarak untuk kepercayaan suatu utang, sehingga memungkinkan mengambil seluruh atau sebagian utang dari benda itu.⁷

Pegadaian syariah dalam menjalankan operasionalnya berpegang kepada prinsip syariah. Pada dasarnya, produk-produk berbasis syariah memiliki karakteristik seperti tidak memungut bunga dalam berbagai bentuk karena riba, dan melakukan bisnis untuk memperoleh imbalan jasa dan/ atau bagi hasil. Payung hukum gadai syariah berpegang pada Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *Rahn* yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan utang dalam bentuk *Rahn* diperbolehkan, dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tentang gadai emas.⁸

Sedangkan gadai (*rahn*) menurut etimologi berarti *atsubuutu wa Dawamu* artinya tetap dan kekal, atau *al-Habsu wa Luzumu* artinya pengekangan dan

⁷ Muhammad sholahuddin *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam* (Yogyakarta : Ombak 2014), hlm 197.

⁸ Andri Soemitra, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Kencana 2009), hlm 389

keharusan dan juga bias berarti jaminan.⁹Gadai adalah pinjam meminjam uang dengan menyerahkan barang dalam batas waktu bila telah sampai waktunya tidak ditebus, barang itu menjadi hak orang yang member pinjaman.¹⁰

Menurut Bank Indonesia, *Rahn* adalah akad penyerahan barang/harta (marhun) dari nasabah (rahin) kepada bank (murtahin) sebagai jaminan sebagian atau seluruh hutang.¹¹

Berdasarkan dari beberapa pengertian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa gadai (rahn) dalam pandangan islam adalah harta benda yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang dan kepercayaan utang yang dapat dijadikan (seluruh dan sebagiannya) untuk pembayaran hutang apabila orang yang berhutang tidak dapat membayar hutangnya.

2. Dasar Hukum Gadai (*Rahn*)

Dasar hukum *rahn* bersumber dari Al-Quran, Hadits, dan kesepakatan para ulama, kaidah fiqh, serta Fatwa DSN, antara lain :¹²

a. Al-Qur'an

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَنْ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمْنَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ وَلَا تَكُونُوا الشَّاهِدَةَ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ إِثْمٌ قَلْبُهُ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ﴾

⁹Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 265.

¹⁰ A. Wangsawidjaja, *pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2012), hlm 306

¹¹ Zulkifli Sunarto, *Panduan Praktisi Perbankan Syariah* (Jakarta : Zikrul Hakim, 2003), hlm

¹² Fatwa DSN No. 25/MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentag *Rahn*

Artinya :Jika kamu dalam perjalanan (dan bermuamalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang berpiutan). Akan tetapi jika sebagian kamu mempercayai sebagian yang lain, maka hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (hutangnya) dan hendaklah ia bertawakal kepada Allah Tuhannya, dan janganlah kamu (para saksi) menyembunyikan persaksian, dan barang siapa yang menyembunyikannya, maka sesungguhnya ia adalah orang yang berdosa hatinya, dan Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjaka.(Q.S Al-Baqarah : 283)

b. Hadits

Hadis riwayat Aisyah ra., ia berkata:

عَنْ عَائِشَةَ قَالَتْ اشْتَرَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ يَهُودِيٍّ طَعَامًا وَرَهْنَهُ دِرْعًا مِنْ حَدِيدٍ

“Rasulullah saw. pernah membeli makanan dari seorang Yahudi dengan cara menanggukkan pembayarannya, lalu beliau menyerahkan baju besi beliau sebagai jaminan”. (shahih muslim)¹³

c. Ijmak

Dari ayat dan hadits di atas, para ulama telah bersepakat (ijmak) bahwa barang sebagai jaminan hutang (*Rahn*) dibolehkan (*Jaiz*) baik dalam berpergian maupun tidak dalam berpergian

d. Kaidah Fiqih

Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

e. Fatwa DSN-MUI No. 25/DSN/MUI/III/2002 tentang *Rahn*

Fatwa ini memberikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :¹⁴

¹³ Al-Mundziri, *Ringkasan Sahih Muslim*, (Bandung: Jabal, 2013, No.970, Cet.2) hal.372

Pertama : Hukum

Bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalam bentuk Rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut.

Kedua : Ketentuan Hukum ¹⁵

- 1) *Murtahin* (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan *Marhun* (barang) sampai semua hutang rahin (yang meyerahkan barang) dilunasi.
- 2) *Marhun* dan manfaatnya tetap menjadi milik *Rahin*. Pada prinsipnya, *Marhun* tidak boleh dimanfaatkan oleh *Murtahin* kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai barang dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.
- 3) Pemeliharaan dan penyimpanan barang pada dasarnya menjadi kewajiban penggadaai barang, namun dapat dilakukan juga oleh penerima barang, sedangkan biaya pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban penggadaai.
- 4) Besarnya biaya pemeliharaan dan penyimpanan barang tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5) Penjualan barang (*marhun*)
 - a. Apabila jatuh tempo, penerima barang harus memperingati pemilik barang untuk segera melunasi hutangnya.

¹⁴ Sultan Remy Sjahdeini, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek Hukumnya*, (Jakarta : Kencana, 2014), hlm 365.

¹⁵ Ahmad Rodoni, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, (Jakarta : Zirul Hakim, 2008), hlm 191.

- b. Apabila pemilik barang tetap tidak dapat melunasi hutangnya, maka barang di jual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
- c. Hasil penjualan barang digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayarkan serta biaya penjualan.
- d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik *Rahin* (pemilik barang) dan kekurangannya menjadi kewajiban *Rahin*.

Ketiga : Penentuan Penutup

- 1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan diantara kedua belah pihak, maka penyelesaian dilakukan melalui Badan Arbitrase Syariah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.
- 2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan, akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

3. Rukun dan Syarat Gadai (*Rahn*)

a) Rukun

Para ulama fiqh berbeda pendapat dalam menetapkan rukun *rahn*. Namun bila digabungkan *Rahn*, menurut jumhur ulama rukun *Rahn* ada lima :¹⁶

- 1. *Rahin* (orang yang menggadaikan)

¹⁶ Syekh Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*, hlm 257-285

2. *Murtahin* (orang yang menerima gadai)
3. *Marhun/rahn* (objek/barang gadai)
4. *Marhun Bih* (utang)
5. *Sighat* (ijab Kabul)

b) Syarat-syarat *Rahn*

Para ulama fiqh mengemukakan syarat-syarat *ar-rahn* sesuai dengan *ar-rahn* itu sendiri, yaitu :¹⁷

1. Para pihak dalam pembiayaan *rahn* (*rahin dan murtahin*)

Para pihak yang melakukan akad *rahn* harus cakap bertindak menurut hukum.

2. Adanya kesepakatan (*sighat*) atau ijab Kabul.
3. *Marhun bih* (utang)

Utang wajib dibayar kembali oleh debitur kepada kreditur. Utang boleh dilunasi dengan agunan, dan utang harus jelas serta tertentu (dapat dikuantifikasikan atau dihitung jumlahnya).

4. *Marhun* (barang)

(a). karakteristik barang

Menurut ahli Hukum Islam (fuqaha), karakteristik barang jaminan utang adalah :

1. Barang jaminan itu boleh dijual dan nilainya seimbang dengan utang
2. Berharga dan boleh dimanfaatkan

¹⁷ A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2012), hlm 310

3. Jelas dan tertentu
4. Milik sah orang yang berutang
5. Tidak terkait dengan hak orang lain
6. Merupakan harta utuh dan,
7. Boleh diserahkan baik materinya maupun manfaatnya.

Di samping syarat-syarat diatas para ulama *fiqh* sepakat mengatakan, bahwa *ar-rah*n itu baru dianggap sempurna apabila barang yang di *rah*n kan itu secara hukum telah berada di tangan pemberi utang, dan uang dibutuhkan telah diterima peminjam uang. Apabila jaminan itu berupa benda tidak bergerak seperti rumah dan tanah, maka tidak harus rumah dan tanah itu yang diberikan, tetapi cukup surat jaminan tanah atau surat-surat tanah itu yang diberikan kepada orang yang memberikan piutang. Syarat yang terakhir demi kesempurnaan *rah*n adalah bahwa barang jaminan itu dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang. Syarat ini menjadi penting karena Allah dalam QS. AL-Baqarah : 283 menyatakan barang jaminan itu dipegang atau dikuasai secara hukum oleh pemberi piutang.¹⁸

4. Manfaat dan Risiko *Rahn* (Gadai)

a) Manfaat gadai (*Rahn*)

Manfaat yang dapat diambil dari prinsip *ar-rah*n adalah sebagai berikut :¹⁹

1. Menjaga kemungkinan nasabah untuk lalai atau bermain-main dengan fasilitas pembiayaan yang diberikan oleh bank.

¹⁸ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat* (Jakarta : Kencana, 2010), hlm 268.

¹⁹ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm 130.

2. Memberikan keamanan bagi semua penabung dan pemegang deposito bahwa dananya tidak akan hilang begitu saja jika nasabah peminjam ingkar janji karena ada sesuatu asset atau barang (*mahun*) yang dipegang oleh bank.
3. Jika *rahn* diterapkan dalam mekanisme pegadaian, sudah tentu akan sangat membantu saudara kita yang kesulitan dana, terutama di daerah-daerah.
4. Adapun manfaat yang langsung didapatkan bank adalah biaya-biaya konkret yang harus dibayar oleh nasabah untuk pemeliharaan dan keamanan asset tersebut. Jika penahanan asset berdasarkan *fidusia* (penahanan barang bergerak sebagai jaminan pembayaran), nasabah juga harus membayar biaya asuransi yang besarnya sesuai dengan yang berlaku secara umum.

b) Risiko *Ar-Rahn*

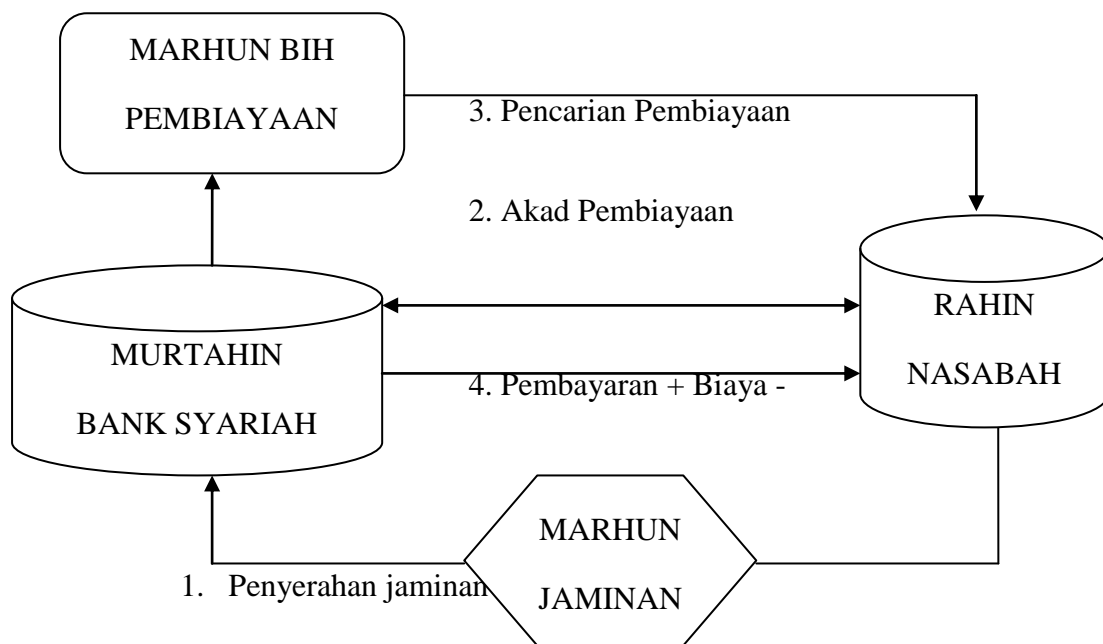
Adapun risiko yang mungkin terdapat pada *rahn* apabila diterapkan sebagai produk adalah :²⁰

1. Risiko tak terbayarnya utang nasabah (wanprestasi)
2. Risiko penurunan nilai asset yang ditahan atau rusak.

²⁰ Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta : Gema Insani, 2001), hlm 131

c) **Skema Ar-Rahn**

Dalam skema *ar-rah*n, menggambarkan mekanisme transaksi *rahn* dalam bank syariah atau lembaga keuangan syariah.²¹



Skema 2.1

Keterangan (skema)

1. Nasabah menyerahkan jaminan (*marhun*) kepada bank syariah (*murtahun*). Jaminan berupa barang bergerak.
2. Akad pembiayaan dilaksanakan antara *rahn* (nasabah) dan *murtahin* (bank syariah).
3. Setelah kontrak pembiayaan ditandatangani, dan agunan diterima oleh bank syariah, maka bank syariah mencairkan pembiayaan.

²¹ Ismail, *Perbankan Syariah*, (Jakarta : Kencana, 2011), hlm 211

4. *Rahin* melakukan pembayaran kembali ditambah dengan *fee* yang telah disepakati. *Fee* ini berasal dari sewa tempat dan biaya untuk pemeliharaan agunan.

5. Berakhirnya Ikatan Akad Gadai (*Rahn*)

Akad gadai berakhir atau abis masanya dengan berbagai hal sebagai berikut :²²

- a. Pembatalan akad gadai dari pihak penggadai walaupun tanpa restu pengadai. Sebab, hak gadai adalah milik penggadai, sedangkan gadai dari jalur penggadai bersifat tidak meningkat.
- b. Adanya pembebasan semua utang.

Menurut *ijma'* ulama, apabila utang masih tersisa walaupun sedikit, akad gadai belum berakhir, sebagaimana dikutip Imam al-Mundzir. Hal ini sama seperti hak penahanan barang yang diperjual belikan karena gadai merupakan jaminan semua bagian terkecil dari hutang. Apabila pegadai mengajukan persyaratan, misalnya dia berkata, “Ketika sebagian hutang telah saya lunasi, “maka akad gadai hukumnya batal karena terdapat persyaratan yang kontra produktif dengan akad gadai.

- c. Binasanya atau rusaknya barang gadaian karena akad gadai menjadi berakhir akibat hilangnya objek akad atau tersia-sianya barang gadaian.
- d. Barang gadaian berubah menjadi barang yang tidak berharga, yakni sesuatu yang tidak mubah untuk diambil kemanfaatannya. Sebagaimana dalam kasus apabila barang gadaian berupa perasan anggur, lalu perasan anggur berubah menjadi arak ketika berada ditangan penggadai, maka kepemilikan pegadai

²²Wahbah Zuhaili, *Fiqh Iman Syafi'i* 2 (Jakarta : Darul Fikr, 2012), hlm 94.

terhadap barang gadaian berubah menjadi barang yang diharamkan dan tidak diperkenankan melakukan tindakan apa pun terkait barang gadaian itu. Oleh sebab itu, hak milik dan akad gadai hukumnya batal, sama seperti hewan yang digadaikan kemudian mati.

6. Aplikasi Gadai (*Rahn*) Dalam Perbankan Syariah

Dalam perbankan syariah, *rahn* dapat diterapkan dalam dua bentuk, yaitu sebagai berikut :²³

a. Produksi Pelengkap

Apabila *rahn* sebagai produk pelengkapan dari bank syariah, maka *rahn* merupakan akad tambahan terhadap produk lain dari bank syariah. Produk lain tersebut adalah murabahah, salam, dan lain-lain. Sebagai produk pelengkap, bank menahan barang nasabah sebagai jaminan bagi pelaksanaan kewajiban nasabah yang timbul dari akad yang dijamin.

Dalam hal ini, bank biasanya tidak menahan barang jaminan itu secara fisik, tetapi hanya surat-suratnya.

b. Produk Tersendiri

Apabila *rahn* merupakan produk tersendiri, bank menerima akad *rahn* sebagai jaminan atas hutang tersebut ditetaskan oleh bank. *Rahn* sebagai produk ini biasanya menjadi dasar untuk transaksi gadai, seperti gadai emas.

²³Muhammad Syafi'i Antoni, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, (Jakarta : Tazkia Institute, 1999), hlm 183.

B. Hal-Hal yang Berkaitan Dengan Gadai (*Rahn*)

1. Penguasaan Barang Agunan

Para ulama juga sepakat menyatakan bahwa agunan (*ar-rahn*) itu baru dianggap sempurna apabila barang yang digunakan itu secara hukum sudah berada ditangan pemberi hutang (*rahin*). Dengan adanya *qabdhul marhun* penguasaan barang jaminan oleh murtahin). Maka akad *rahn* bersifat mengikat kedua belah pihak. Dalam Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *RahnTasjily* ditegaskan bahwa *rahn* menyerahkan "bukti kepemilikan" barang kepada *murtahin*. Berdasarkan fatwa tersebut, barang yang digunakan tetap dikuasai dan dimiliki oleh pemberi jaminan.²⁴

2. Pengikat barang agunan (*Rahn*)

Dalam Fatwa DSN No.68/DSN-MUI/III/2008 tentang *RahnTasjily* ditegaskan antara lain bahwa barang jaminan (*marhun*) dapat dijual paksa/dieksekusi langsung maupun lelang atau dijual kepihak lain sesuai prinsip syariah. *Rahin* (orang yang menggadaikan/menjaminkan) memberikan wewenang kepada murtahin atau penerima gadai (dalam hal ini bank) untuk mengeksekusi barang apabila *Rahin* tidak dapat melunasi utangnya.

3. Pemanfaatan barang agunan (*Rahn*)

Juhur ulama, selain ulama Hanabila berpendapat bahwa pemegang barang jaminan tidak boleh memanfaatkan barang jaminan karena barang itu bukan miliknya secara penuh. Hak pemegang barang jaminan terhadap barang itu hanyalah sebagai jaminan piutang yang ia berikan, apabila orang yang berhutang tidak mampu

²⁴A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2012), hlm 311

melunasi hutangnya, barulah ia boleh menjual barang itu untuk melunasi piutangnya, dan apabila ada kelebihan dalam penjualan tersebut, maka wajib dikembalikan kepada pemiliknya. Apabila pemilik barang mengizinkan pemegang agunan memanfaatkan barang agunan tersebut, maka sebagian ulama Hanafiyah membolehkannya, sedangkan sebagian ulama lainnya (Hambali, Maliki, dan Safi'i) tidak membolehkannya. Tidak boleh karena apabila barang jaminan itu dimanfaatkan pemegang agunan, maka hal itu masuk dalam kategori riba yang dilarang oleh syariah. Disamping itu, ridho dan izin dalam hal ini cenderung dalam keadaan terpaksa, karena khawatir tidak akan mendapatkan uang yang akan dipinjamkan itu.

Dalam fatwa DSN No. 68/DSN-MUI/III/2008 tentang *Rahntasjily* ditegaskan bahwa pemanfaatan barang *marhun* oleh *rahin* harus dalam batas kewajaran sesuai kesepakatan. Berdasarkan fatwa tersebut, pemanfaatan barang agunan oleh debitur sendiri atau oleh *rahn* atau pemilik barang agunan.

4. Penjualan Barang Agunan (*Rahn*) Setelah Jatuh Tempo.

Dalam tradisi arab dahulu, jika orang yang menggadaikan barang tidak mampu mengembalikan pinjaman, maka barang gadainya (*ar-rahn*) keluar dari miliknya dan dikuasai oleh penerima gadai. Kemudian islam membatalkan cara tersebut dan melarangnya, sebagaimana hadis dari Muawiyah bin Abdullah bin Ja'far.²⁵

“Bahwa seseorang menggadaikan sebuah rumah di madinah untuk waktu tertentu. Kemudian masanya lewat. Lalu yang menerima gadai menyatakan : ‘ini menjadi rumahku.’ Kemudian Rasulullah bersabda : janganlah ia (pemegang gadai)

²⁵A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2012), hlm 314.

menutup hak barang gadai dari pemiliknya, yang menggadaikan. Ia berhak memperoleh bagiannya dan jika berkewajiban membayar kerugiannya.” (HR. Ad-daruquthni)

Jika sudah jatuh tempo, orang yang menggadaikan barang berkewajiban melunasi hutangnya. Jika ia tidak melunasinya dan dia tidak mengizinkan barangnya dijual untuk pelunasan utang tersebut, maka hakim berhak memaksanya untuk melunasi atau menjual barang gadaianya tersebut. Jika hakim telah menjual barang tersebut kemudian terdapat kelebihan dari kewajiban membayar, maka kelebihan itu menjadi milik orang yang menggadaikan, dan jika masih belum tertutup maka si penggadai berkewajiban menutup isinya.

5. Musnahnya Barang Agunan (*Rahn*)

Para ulama berbeda pendapat tentang siapa yang bertanggung jawab ketika barang yang diagunkan atau digadaikan (*rahn*) rusak atau musnah. Imam Shafi’i, Ahmad, Abu Sur, dan kebanyakan ahli hadits, menyatakan bahwa pemegang gadai sebagai pemegang amanah tidak dapat mengambil tanggung jawab atas hilangnya tanggungannya. Mereka berpendapat demikian sebagaimana hadist Rasulullah SAW : “Barang jaminan tidak boleh disembunyikan dari pemiliknya karena hasil/keuntungan (Dari barang jaminan) dan resiko/kerugian (yang timbul atas barang itu) menjadi tanggung jawabnya.” (HR. Al-Hakim, Al- Baihaqi, dan Ibnu Hibban dari Abu Hurairah) sedangkan Imam Abu Hanafiyah dan jumhur fuqaha kuffah berpendapat bahwa kerusakan atau kehilangan barang gadai ditanggung oleh penerima gadai. Alasan mereka adalah bahwa barang tersebut merupakan jaminan atas utang sehingga jika barang tersebut musnah, kewajiban melunasi utang juga

menjadi hilang dengan musnahnya barang tersebut. Besarnya tanggungan terhadap barang gadai yang hilang atau rusak adalah harga terendah atau dengan harga utang. Tapi ada juga yang berpendapat tanggungan tersebut sebesar harganya.²⁶

6. AKHIR GADAI (*Rahn*)

Berakhir akad *Rahn*, menurut Wahbah Zuhaili adalah karena :

- a. Barang telah diserahkan kembali kepada pemiliknya.
- b. *Rahnin* (penggadai) membayar utangnya.
- c. dijual paksa, yaitu dijual berdasarkan penetapan hakim atas permintaan *Rahnin*.
- d. Pembebasan utang dengan cara apapun, sekalipun dengan pemindahan oleh *murtahin*.

²⁶A. Wangsawidjaja, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta : Gramedia, 2012), hlm 345.

BAB III

GAMBARAN UMUM PERUSAHAAN

A. Sejarah PT. BRISyariah

Berawal dari akuisisi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., terhadap Bank Jasa Arta pada 19 Desember 2007 dan setelah mendapatkan izin dari Bank Indonesia pada 16 Oktober 2008 melalui suratnya o.10/67/KEP.GBI/DpG/2008, maka pada tanggal 17 November 2008 PT. Bank BRISyariah secara resmi beroperasi. Kemudian PT. Bank BRISyariah merubah kegiatan usaha yang semula beroperasi secara konvensional, kemudian diubah menjadi kegiatan perbankan berdasarkan prinsip syariah Islam.

Dua tahun lebih PT. Bank BRISyariah hadir mempersembahkan sebuah bank ritel modern terkemuka dengan layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna. Melayani nasabah dengan pelayanan prima (*service excellence*) dan menawarkan beragam produk yang sesuai harapan nasabah dengan prinsip syariah.

Kehadiran PT. Bank BRISyariah di tengah-tengah industri perbankan nasional dipertegas oleh makna pendar cahaya yang mengikuti logo perusahaan. Logo ini menggambarkan keinginan dan tuntutan masyarakat terhadap sebuah bank modern sekelas PT. Bank BRISyariah yang mampu melayani masyarakat dalam kehidupan modern. Kombinasi warna yang digunakan merupakan turunan dari warna biru dan putih sebagai benang merah dengan brand PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk.

Aktivitas PT. Bank BRISyariah semakin kokoh setelah pada 19 Desember 2008 ditandatangani akta pemisahan Unit Usaha Syariah PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., untuk melebur ke dalam PT. Bank BRISyariah (proses *spin off*) yang berlaku efektif pada tanggal 1 Januari 2009. Penandatanganan dilakukan oleh Bapak Sofyan Basir selaku Direktur Utama PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dan Bapak Ventje Rahardjo selaku Direktur Utama PT. Bank BRISyariah.

Saat ini PT. Bank BRISyariah menjadi bank syariah ketiga terbesar berdasarkan aset. PT. Bank BRISyariah tumbuh dengan pesat baik dari sisi aset, jumlah pembiayaan dan perolehan dana pihak ketiga. Dengan berfokus pada segmen menengah bawah, PT. Bank BRISyariah menargetkan menjadi bank ritel modern terkemuka dengan berbagai ragam produk dan layanan perbankan.

Sesuai dengan visinya, saat ini PT. Bank BRISyariah merintis sinergi dengan PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., dengan memanfaatkan jaringan kerja PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero), Tbk., sebagai Kantor Layanan Syariah dalam mengembangkan bisnis yang berfokus kepada kegiatan penghimpunan dana masyarakat dan kegiatan konsumen berdasarkan prinsip Syariah.

B. Visi dan Misi PT. BRISyariah KCP Binjai

1. Visi

Menjadi bank ritel modern terkemuka dengan ragam layanan finansial sesuai kebutuhan nasabah dengan jangkauan termudah untuk kehidupan lebih bermakna.

2. Misi

- a. Memahami keragaman individu dan mengakomodasi beragam kebutuhan finansial nasabah.
- b. Menyediakan produk dan layanan yang mengedepankan etika sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- c. Menyediakan akses ternyaman melalui berbagai sarana kapan pun dan dimana pun.
- d. Memungkinkan setiap individu untuk meningkatkan kualitas hidup dan menghadirkan ketenteraman pikiran.

Nilai Utama BRISyariah

1. Kemudahan dan kenyamanan akses perbankan
2. Pemahaman mendalam yang progresif
3. Fokus pada masalah
4. Penerapan etika secara inklusif

C. Produk-produk PT. BRISyariah

1. Dana Pihak Ketiga
 - a. Tabungan Faedah BRISyariah iB

Tabungan BRISyariah iB merupakan tabungan dari BRISyariah bagi nasabah perorangan yang menggunakan prinsip titipan, dipersembahkan untuk Anda yang menginginkan kemudahan dalam transaksi keuangan.

b. Tabungan Haji BRISyariah iB

Tabungan BRISyariah iB merupakan tabungan investasi dari BRISyariah bagi calon haji yang bertujuan untuk memenuhi kebutuhan Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) dengan prinsip bagi hasil.

c. Tabungan Impian BRISyariah iB

Tabungan Impian BRISyariah iB adalah tabungan berjangka dari BRISyariah dengan prinsip bagi hasil yang dirancang untuk mewujudkan impian Anda dengan terencana. Tabungan Impian BRISyariah iB memberikan ketenangan serta kenyamanan yang penuh nilai kebaikan serta lebih berkah karena pengelolaan dana sesuai syariah serta dilindungi asuransi.

d. Giro BRISyariah iB

Merupakan simpanan untuk kemudahan berbisnis dengan pengelolaan dana berdasarkan prinsip titipan (wadi'ah yad dhamanah) yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan Cek/Bilyet Giro.

e. Deposito BRISyariah iB

Deposito BRISyariah iB adalah produk investasi berjangka kepada Deposan dalam mata uang tertentu.

2. Produk Pembiayaan PT. BRISyariah

a. Qardh Beragun Emas BRISyariah iB (d.h Gadai)

Gadai BRISyariah iB hadir untuk memberikan solusi memperoleh dana tunai untuk memenuhi kebutuhan dana mendesak ataupun untuk keperluan modal usaha dengan proses cepat, mudah, aman dan sesuai syariah untuk ketentraman nasabah.

b. KKB BRISyariah iB

Pastikan impian kendaraan idaman untuk kebaikan keluarga bukan menjadi masalah lagi.

c. KPR BRISyariah iB

Pembiayaan Kepemilikan Rumah kepada perorangan untuk memenuhi sebagian atau keseluruhan kebutuhan akan hunian dengan menggunakan prinsip jual beli (Murabahah) dimana pembayarannya secara angsuran dengan jumlah angsuran yang telah ditetapkan di muka dan dibayar setiap bulan.

d. KMG BRISyariah iB

Salah satu produk untuk memenuhi kebutuhan karyawan khususnya karyawan dari perusahaan yang bekerjasama dengan PT. Bank BRISyariah dalam Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP), dimana produk ini dipergunakan untuk berbagai keperluan karyawan dan bertujuan untuk meningkatkan loyalitas karyawan Program Kesejahteraan Karyawan (EmBP).

e. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB

Setiap muslim pasti merindukan *Baitullah*, sempurnakan kerinduan Anda pada *Baitullah* dengan ibadah Umrah. Pembiayaan Umrah BRISyariah iB kini hadir membantu anda untuk menyempurnakan niat Anda beribadah dan berziarah ke *Baitullah*.

3. Produk *Electronic Banking* BRIS

a. Kartu ATM dan Kartu debit BRIS

b. *Cash Management System*

Jenis transaksi yang dapat dilakukan adalah:

- a) Informasi Saldo Rekening
- b) Informasi Mutasi Rekening
- c) Transfer Dana ke Rekening BRIS
- d) Pembayaran Tagihan. Misalnya, PLN, Telkom, dan lainnya

4. *SMS Banking*

5. *University / School Payment System (SPP)*

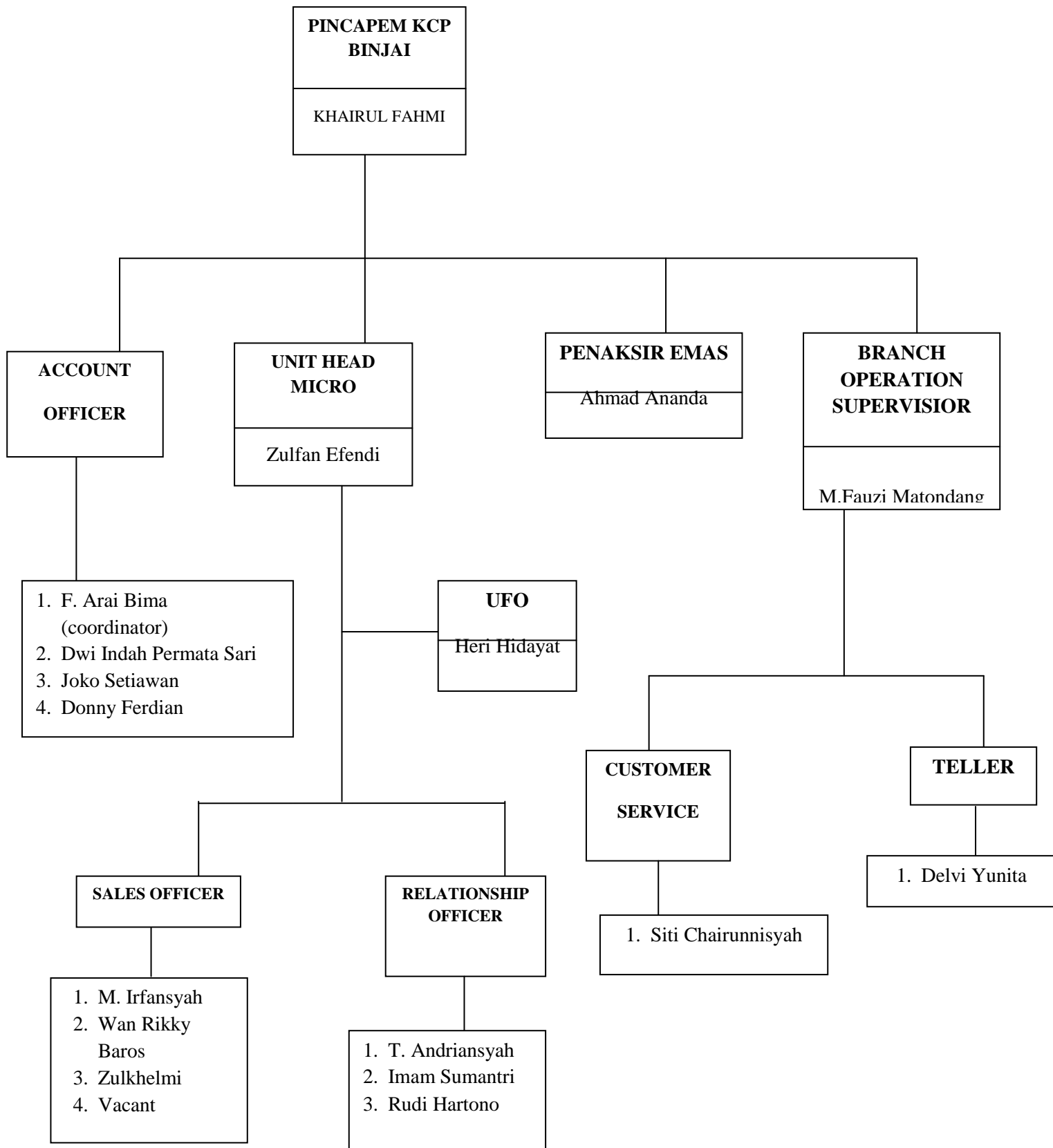
7 Budaya Kerja BRISyariah

BRISyariah memiliki 7 budaya kerja yang diterapkan untuk semua karyawannya yang diantaranya adalah :

- a) Tawakal
- b) Integritas
- c) Antusias
- d) Profesional
- e) Orientasi Bisnis
- f) Kepuasan Pelanggan
- g) SDM (Penghargaan SDM)

D. STRUKTUR ORGANISASI

KANTOR CABANG PEMBANTU BINJAI TAHUN 2016



E. Uraian Jabatan

Berdasarkan struktur organisasi diatas, berikiut akan diuraikan tugas dan tanggung jawab masing-masing.

a. Pemimpin Cabang Pembantu

Adalah struktur tertinggi di kantor cabang pembantu yang bertanggung jawab atas keseluruhan berjalannya sistem operasional perbankan di Level kantor dan membawahi keseluruhan Manager, baik bisnis maupun operasional.

b. *Account Officer*

Melakukan proses marketing untuk segmen SME dan *commercial* khususnya giro dan deposito.

c. *Branch Operation Supervisor*

Mengkoordinir kegiatan pelayanan dan transaksi operasional teller dan Customer service sehingga kebutuhan nasabah dapat terpenuhi dan tidak ada transaksi yang tertunda penyelesaiannya untuk mencapai service excellent (Implementasi Fungsi Service Provider).

d. *Teller*

Melayani nasabah untuk transaksi setor dan penarikan tunai dan non tunai serta transaksi lainnya sesuai aturan dan SLA yang ditetapkan untuk mencapai service excellent – Implementasi fungsi Service Provider.

e. Customer Service

Melayani nasabah memberikan informasi produk dan layanan serta melaksanakan transaksi operasional sesuai dengan kewenangannya, berdasarkan instruksi nasabah dan kebijakan serta aturan yang telah ditetapkan.

f. Sales

Melakukan proses marketing untuk segmen konsumen.

g. Unit Head Micro

Bertanggung jawab atas program-program Marketing untuk segmen bisnis mikro sekaligus bertanggung jawab terhadap SDM yang menjadi subordinatnya baik dari segi bisnis maupun administrasi.

h. UFO

Melakukan review pembiayaan, mencermati setiap pengajuan pembiayaan untuk diajukan ke komite kantor pusat.

i. Penaksir Emas

Melakukan penaksiran emas terhadap nasabah yang ingin mengajukan pembiayaan dengan jaminan emas.

j. Relationship Officer

Melakukan proses marketing dan menjalin hubungan dengan nasabah.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Perlindungan Hukum Terhadap Nasabah Pelaku Gadai Emas Di

BRISyariah KCP Binjai

1. Hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah penggadai

Berdasarkan undang-undang No. 7 tahun 1992 sebagaimana telah diubah kedalam undang-undang No. 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kepada masyarakat dalam bentuk kredit dan/atau dalam bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.²⁷

Melalui kewenangannya tersebut, BRISyariah sebagai suatu badan usaha milik negara (BUMN) dengan bentuk perseroa terbatas (PT), yang menjalankan fungsinya sebagai “*financial intermediary*” menawarkan suatu fasilitas pembiayaan kepada masyarakat dengan memakai jaminan gadai. Pelaksanaan gadai BRISyariah merupakan suatu sistem gadai yang berdasarkan syariat islam dan hukum islam. Penggunaan sistem gadai syariah merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan berbagai konsep perekonomian berbasis islam.

²⁷ Hasil Wawancara dengan Staf Penaksir Gadai Ahmad Ananda Tanggal 7 Januari 2016, Pukul: 14:00.

Dalam dunia perbankan, masyarakat pengguna jasa perbankan disebut nasabah. Menurut pasal 1 ayat 16 Undang-undang No. 21 Tahun 2008 tentang perbankan syariah, yang dimaksud dengan nasabah adalah pihak yang menggunakan jasa bank syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS). Menurut undang-undang ini juga nasabah dibagi menjadi tiga yaitu :²⁸

Pasal 1

Ayat (17) :

Nasabah penyimpan adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau unit usaha syariah (UUS) dalam bentuk simpanan berdasarkan akad antara bank syariah atau UUS dan nasabah yang bersangkutan.

Ayat (18) :

Nasabah investor adalah nasabah yang menempatkan dananya di bank syariah dan/atau UUS dalam bentuk investasi berdasarkan akad antara bank syariah dan UUS dan nasabah yang bersangkutan.

Ayat (19) :

Nasabah penerima fasilitas adalah nasabah yang menerima fasilitas dana atau yang dipersamakan dengan itu, berdasarkan prinsip syariah.

Dalam hal ini, BRISyariah berkedudukan sebagai lembaga penyalur dana bagi masyarakat yang mengaami kekurangan dana . dana yang disalurkan oleh BRISyariah adalah dana yang berasal dari pihak ketiga. Sedangkan nasabah berkedudukan sebagai pihak yang menerima bantuan dana dari pihak bank syariah dengan menyerahkan emas atau harta miliknya sebagai jaminan atas pelunasan hutang.

²⁸ Fokus Media, *Undang-undang Ekonomi Syariah*, (Jakarta : Fokus Media,2009), hlm 37

Berdasarkan uraian diatas maka dapat dilihat bahwa hubungan hukum antara BRISyariah dengan nasabah pengguna dana didasarkan atas hubungan kontraktual yang menimbulkan hak dan kewajiban bagi bank syariah yang berkedudukan sebagai penerima fasilitas pembiayaan.

2. Prinsip hubungan bank syariah (*Murtahin*) dengan nasabah penggadai (*Rahin*).

Dalam pemberian kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank wajib memperhatikan hal-hal sebagaimana ditentukan dalam pasal 8 ayat (1) dan (2) undang-undang tentang perbankan yang berbunyi :

Pasal 8

ayat 1

Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, bank umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atau iktikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi hutangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan diperjanjikan.

Ayat 2

Bank umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Bank Indonesia.

Salah satu karakteristik bank syariah yang membuatnya berbeda dengan bank konvensional adalah hubungan hukum yang tercipta antara bank syariah dengan

nasabah. Hubungan hukum yang tercipta setiap kali terjadi transaksi antar bank syariah dengan nasabah tidak hanya hubungan hukum antara bank syariah dengan nasabah pengguna dana didasarkan atas perjanjian yang dilakukan oleh pihak terkait. Perjanjian yang dilakukan menimbulkan adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak.

Hubungan hukum yang tercipta antara BRISyariah dengan nasabah pengguna dana adalah dalam produk gadai emas di BRISyariah didasarkan atas beberapa prinsip yaitu :²⁹

- 1) Prinsip kepercayaan
- 2) Prinsip kehati-hatian, dan
- 3) Prinsip tanggungjawab.

Prinsip kepercayaan yang diterapkan oleh BRISyariah diimplementasikan dalam bentuk kepercayaan yang diberikan oleh BRISyariah kepada nasabah pengguna dana untuk menggunakan dana yang diberikan kepada bank syariah untuk keperluan konsumtif maupun usaha.

Prinsip kehati-hatian diimplementasikan melalui diterapkannya semua persyaratan dan peraturan perundang-undangan yang terkait dengan pemberian pembiayaan oleh bank syariah (*murtahin*) yang bersangkutan secara konsisten berdasarkan itikad baik.

Prinsip tanggung jawab diimplementasikan melalui perlakuan baik oleh bank atas barang jaminan yang dititipkan oleh nasabah penggadai (*Rahin*) sebagai jaminan

²⁹ Hermansya, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, (Jakarta : Kencana, 2005), hlm 134

atas hutang yang diberikan oleh bank syariah (*Murtahin*). Barang atau harta yang telah dijamin tersebut harus dijaga dengan baik untuk menghindari kerusakan atau turunnya nilai jaminan tersebut.

3. Perlindungan hukum nasabah pelaku gadai emas syariah di BRISyariah KCP Binjai

Meskipun pihak bank telah mematuhi peraturan yang disusun untuk menghindari terjadinya kerugian nasabah, namun terkadang kerugian tersebut tetap terjadi karena adanya kelalaian maupun kesalahan, baik yang disengaja maupun tidak. Hal tersebut merupakan suatu yang tidak dapat dihindari. Oleh karena itu, adanya suatu peraturan yang dapat melindungi hak-hak nasabah apabila terjadi kerugian sangat diperlukan.

Berbicara mengenai perlindungan hukum terhadap nasabah tidak dapat dipisahkan dengan undang-undang No 8 tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, karena pada dasarnya undang-undang inilah yang dijadikan pedoman bagi perlindungan nasabah sebagai konsumen secara umum.

Dalam hal ini, nasabah ditempatkan sebagai konsumen karena nasabah merupakan pengguna produk atau jasa yang dikeluarkan atau ditawarkan oleh pihak bank sebagai pelaku usaha.

Pasal 19 UUPK menyatakan bahwa jika konsumen menderita-menderita kerugian berupa terjadinya kerusakan, pencemaran, atau kerugian financial dan kesehatan karena mengkonsumsi produk yang di perdagangkan, produsen sebagai

pelaku usaha wajib memberikan penggantian kerugian, dalam bentuk pengembalian uang, penggantian barang, perawatan, maupun pemberian santunan.

Selain itu, berdasarkan pada surat bukti gadai emas yaitu, apabila barang jaminan milik nasabah yang mengalami kerusakan atau kehilangan karena tindakan pidana pencurian, maka atas resiko tersebut pihak bank bertanggung jawab dan berkewajiban untuk mengganti kerugian yang timbul sebesar 100% dari nilai taksiran barang-barang setelah diperhitungkan besarnya pembiayaan dan biaya sewa/ biaya pemeliharaan barang jaminan.

Dari pernyataan tersebut dapat dilihat bahwa apabila terjadi kerusakan atau kehilangan karena tindak pidana pencurian yang disebabkan oleh gadai (*murtahin*), maka *murtahin* akan memberikan ganti rugi sebesar 100% dari nilai taksiran barang setelah diperhitungkan besarnya biaya pembiayaan dan biaya sewa atau biaya pemeliharaan barang jaminan.

BRISyariah KCP Binjai sebagai penerima gadai (*Murtahin*) telah memberikan suatu perlindungan hukum kepada nasabah penggadai (*Rahin*) terkait dengan adanya kemungkinan terjadinya kerugian yang disebabkan oleh kelalaian pihak bank penerima gadai (*murtahin*) dalam menjaga barang jaminan hutang yang berada dalam kuasanya melalui pemberian ganti rugi atas kerugian tersebut.

B. Implementasi Gadai Emas di BRISyariah KCP Binjai

Kebutuhan akan dana untuk berbagai kepentingan dalam lalu lintas perekonomian masyarakat merupakan hal yang biasa kita temukan dalam kehidupan sehari-hari. Masyarakat senantiasa berkembang dan bergerak dengan dinamis dan

tidak biasa terlepas dari spek perekonomian dalam konteks ini, kebutuhan akan keberadaan lembaga pembiayaan atau perbankan menjadi sangat signifikan. BRISyariah merupakan suatu badan usaha milik Negara (BUMN) dengan bentuk perseroan terbatas (PT) yang bergerak dalam bidang usaha, salah satunya adalah peminjaman uang kepada masyarakat dengan memakai jaminan gadai.

Gadai emas BRISyariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas, perhiasan ataupun emas batangan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Maka, objek jaminan yang dapat digadaikan pada BRISyariah hanyalah berupa emas, yaitu dalam bentuk perhiasan dan batangan.

Implementasi gadai emas yang ditawarkan oleh BRISyariah didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 maret 2002 tentang *Rahn* emas yang menyatakan bahwa *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.

Pada BRISyariah KCP Binjai implemetasi gadai emas terdapat pelapon pembiayaan yang diberikan untuk kedua jaminan tersebut berbeda untuk masing-masing jenisnya, yaitu :

1. Untuk logam mulia dalam bentuk batangan, pelapon pembiayaan yang diberikan adalah sebesar 90% dari nilai taksiran.
2. Untuk perhiasan, pelapon yang diberikan sebesar 85% dari nilai taksiran.

Jumlah pinjaman yang diberikan oleh bank syariah kepada nasabah yang didasarkan atas nilai jaminan. Nilai jaminan didasarkan oleh harga emas yang

ditetapkan oleh PT. ANTAM atau berdasarkan acuan dunia. Harga emas tersebut kemudian dikalikan dengan berat emas yang digadaikan.

Biaya pemeliharaan ditarik pada saat pelunasan pinjaman yang dilakukan oleh *Rahin*. Cara perhitungan biaya pemeliharaan adalah sebagai berikut :

1. Untuk logam mulia dalam bentuk batangan, biaya pemeliharaannya adalah sebesar 1.1% dari nilai taksiran dan dihitung per 2 periode.
2. Untuk logam mulia dalam bentuk perhiasan, biaya pemeliharaannya adalah sebesar 1.35% dari nilai taksiran dan juga dihitung per 2 periode.

Menurut Fatwa DSN MUI Tentang *Rahn* biaya penyimpanan dan pemeliharaan tidak boleh didasarkan atas jumlah pinjaman. Berdasarkan uraian diatas, dapat dilihat bahwa biaya pemeliharaan hanya ditarik pada saat pelunasan hutang dan didasarkan atas biaya pemeliharaan yang dikenakan selama kurun waktu penyimpanan emas. Meskipun demikian, ditentukannya biaya pemeliharaan berdasarkan persentase tertentu dari nilai taksiran juga belum bisa dianggap tepat. Hal ini dikarenakan berdasarkan Fatwa DSN MUI tentang *Rahn* emas yang menyatakan bahwa biaya pemeliharaan adalah biaya yang nyata-nyata diperlukan bukan didasarkan oleh persentase tertentu.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan beberapa hal, yaitu:

1. Bentuk perlindungan hukum yang diberikan untuk nasabah gadai emas secara Syariah di BRISyariah KCP Binjai apabila terjadi kerusakan atas barang jaminan yang disebabkan oleh kelalaian bank adalah berupa ganti rugi atas kerusakan atau kehilangan barang tersebut sesuai dengan peraturan yaitu :
 - a. Komplikasi hukum ekonomi syariah yang mengatur tentang *Rahn*.
 - b. Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Rahn* dan Fatwa Dewan Syariah Nasional tentang *Rahn Emas*.
 - c. Peraturan Bank Indonesia Nomor 10/17/PBI/2008 tentang produk Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah.
2. Gadai emas pada BRISyariah merupakan produk pembiayaan atas dasar jaminan berupa emas dalam bentuk emas, perhiasan ataupun emas batangan sebagai salah satu alternatif memperoleh uang tunai dengan cepat, aman, dan mudah. Maka, objek jaminan yang dapat digadaikan pada BRISyariah hanyalah berupa emas, yaitu dalam bentuk perhiasan dan batangan. Implementasi gadai emas yang ditawarkan oleh BRISyariah didasarkan pada Fatwa DSN MUI No. 25/DSN-MUI/III/2002 tanggal 26 juni 2002 tentang *Rahn* dan Fatwa DSN MUI No. 26/DSN-MUI/III/2002 tanggal 28 maret 2002

tentang *Rahn* emas yang menyatakan bahwa *Rahn* emas dibolehkan berdasarkan prinsip *Rahn*.

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang dilakukan, penyusun menemukan kekurangan dalam pelaksanaan gadai emas secara syariah di BRISyariah, khususnya dari segi hukum yang mendasari keberlakuan produk ini. Dasar hukum yang digunakan dalam penerapan produk ini masih menggunakan beberapa produk hukum yang ada. Dengan kata lain, belum ada aturan yang mengatur pelaksanaan gadai emas secara syariah di Bank Syariah. Penyusunan menyarankan agar disusunnya suatu dasar hukum yang khusus mengatur tentang gadai emas secara syariah di Bank Syariah yang mengatur tentang hukum, tata cara pelaksanaan, maupun operasional dari gadai emas ini sendiri

Selain itu, perlunya ditetapkan biaya pemeliharaan yang tidak didasarkan oleh presentase tertentu dari nilai taksiran agar sesuai dengan prinsip syariah yang tertuang dalam Fatwa Dewan Syariah Nasional MUI tentang *Rahn* dan *Rahn* emas yang mengatur bahwa biaya pemeliharaan harus didasarkan atas biaya yang nyata dikeluarkan. Bukan atas presentase tertentu dari nilai taksiran.

DAFTAR PUSTAKA

Sholahuddin Muhammad *Lembaga Keuangan dan Ekonomi Islam*
Yogyakarta : Ombak 2014

Soemitra Andri, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Kencana
2009

Rahman Ghazaly Abdul dkk, *Fiqh Muamalat* Jakarta : Kencana, 2010

Wangsawidjaja A, *pembiayaan Bank Syariah* Jakarta : Gramedia, 2012

Sunarto Zulkifli, *Panduan Praktisi Perbankan Syariah* Jakarta : Zikrul
Hakim, 2003

Fatwa DSN No. 25/MUI/III/2002 tanggal 28 Maret 2002 tentang *Rahn*

Antoni Muhammad Syafi'I, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, Jakarta :
Gema Insani, 2001

Sjahdeini Sultan Remy, *Perbankan Syariah Produk-produk dan Aspek-aspek
Hukumnya*, Jakarta : Kencana, 2014

Rodoni Ahmad, Abdul Hamid, *Lembaga Keuangan Syariah*, Jakarta : Zirul
Hakim, 2008

Syekh Al-Jaziri Abdurrahman, *Al-Fiqh 'Alal Madzahibil Arba'ah*,

Ismail, *Perbankan Syariah*, Jakarta : Kencana, 2011

Zuhaili Wahbah, *Fiqh Iman Syafi'I 2* Jakarta : Darul Fikr, 2012

Antoni Muhammad Syafi'i, *Bank Syariah Suatu Pengenalan Umum*, Jakarta :
Tazkia Institute, 1999

Fokus Media, *Undang-undang Ekonomi Syariah*, Jakarta : Fokus Media, 2009

Hermansayah, *Hukum Perbankan Nasional Indonesia*, Jakarta : Kencana,
2005

Ghofur Ansori Abdul, *Penerapan Prinsip Syariah* Jakarta : Kencana 2009

Hasan Zubairi , *Undang-undang Perbankan Syariah* Jakarta : Rajawali Pers
2009

M.Nur Rianto Al arif, *Lembaga Keuangan Syariah* Bandung : Pustaka Setia,
2012